

**ANALISIS YURIDIS PERAN KURATOR DALAM
MENYELESAIKAN KEPAILITAN PERUSAHAAN DENGAN
ASET TIDAK LIKUID**

TESIS

Oleh

**DORLEY FRENLY GURNING
NIM : 2402198013**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**ANALISIS YURIDIS PERAN KURATOR DALAM
MENYELESAIKAN KEPAILITAN PERUSAHAAN DENGAN
ASET TIDAK LIKUID**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

DORLEY FRENLY GURNING

NIM : 2402198013



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dorley Frenly Gurning

Nim : 2402198013

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERAN KURATOR DALAM MENYELESAIKAN KEPAILITAN PERUSAHAAN DENGAN ASET TIDAK LIKUID”**

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saja.
2. Hukum merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 14 Januari 2026



Dorley Frenly Gurning

NIM: 2402198004



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS PERAN KURATOR DALAM MENYELESAIKAN
KEPAILITAN PERUSAHAAN DENGAN ASET TIDAK LIKUID**

Oleh :

Nama : Dorley Frenly Gurning
Nim : 2402198013
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 10 Desember 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H
NIDN: 971434/0020096802

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H
NIP/NIDN: 191691/0305097105

Pembimbing II

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H
NIP/NIDN: 191632/0302117904

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H
NIP/NIDN: 191632/0302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 14 Januari 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Dorley Frenly Gurning
Nim : 2402198013
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

**ANALISIS YURIDIS PERAN KURATOR DALAM MENYELESAIKAN
KEPAILITAN PERUSAHAAN DENGAN ASET TIDAK LIKUID**

Oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
--------------	---------------------------	--------------

1. Dr. Hulman Panjaitan, SH., M.H	Sebagai Ketua
-----------------------------------	---------------



2. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H	Sebagai Anggota
---------------------------------	-----------------



3. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H	Sebagai Anggota
-----------------------------------	-----------------



Jakarta, 14 Januari 2026



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dorley Frenly Gurning
Nim : 2402198013
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Menyelesaikan
Kepailitan Perusahaan Dengan Aset Tidak Likuid

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan sata mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 14 Januari 2026



Dorley Frenly Gurning
NIM: 2402198013

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Menyelesaikan Kepailitan Perusahaan Dengan Aset Tidak Likuid”** ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa keberhasilannya tidak lepas dari bantuan, arahan, dukungan, dan dari berbagai pihak terutama kepada dosen pembimbing yang benar-benar totalitas untuk memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini. Penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H, M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H, M.H selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk serta memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya penulisan tesis ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor I Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Dr. Paltuada Saragi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia dan selaku Dosen Penguji Tamu
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI) serta Karyawan administrasi Bapak Vandry, Bapak Sakal yang selalu siap dalam hal pelayanan dan perhatiannya dalam masa-masa studi dan penyelesaian Tesis ini, kalian adalah luar biasa dengan konsep “Melayani Bukan Untuk Dilayani”
6. Terkhusus dan terisitimewa buat keluarga kecilku, isteri tercinta Linda Sitorus dan Anakku Panggoaranku, Gerald Hotmangaradja Josaphat Gurning (GeGe) yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi penulis dalam proses menyelesaikan study dan telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

7. Segenap Pimpinan dan Manajemen Perusahaan Adani Grup beserta rekan-rekan kerja yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan study Magister Hukum dan penulisan Tesis ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap karya Tesis ini dapat menjadi bahan kajian untuk para akademisi, praktisi, masyarakat luas serta pembuat kebijakan dalam pembaruan dan penyusunan regulasi atau peraturan pelaksana yang lebih efektif dan aplikatif dalam merumuskan peran dan tanggungjawab kurator dalam penyelesaian kepailitan perusahaan dengan aset tidak likuid.

Jakarta, 14 Januari 2026

Dorley Frenly Gurning

NIM; 2402198013



DAFTAR ISI

Lembar Judul	
Lembar Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing	iii
Lembar Persetujuan Tim Penguji Tugas Akhir	iv
Lembar Pernyataan dan Persetujuan Publikasi	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	xii
Abstract	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	9
1. Kerangka Teori	9
a. Teori Progresif	9
b. Teori Hukum Ekonomi	11
2. Kerangka Konsep	13
F. Metode Penelitian	15
1. Spesifikasi Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis Data dan Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisis Data	18
G. Originalitas Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Ekonomi	24
1. Teori Hukum Progresif	24
2. Teori Hukum Ekonomi	27
B. Kepailitan di Indonesia	31

1. Pengertian Kepailitan -----	31
2. Asas-asas Kepailitan -----	33
3. Prinsip Umum Kepailitan -----	35
4. Syarat - syarat Kepailitan -----	38
5. Utang dalam Kepailitan -----	38
6. Pihak – pihak Dalam Kepailitan -----	40
7. Akibat Hukum Kepailitan -----	41
C. Peran Kurator Dalam Kepailitan di Indonesia -----	43
1. Pengertian Kurator -----	43
2. Tugas dan Tanggungjawab Kurator -----	44
3. Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Kurator -----	45
4. Kurator yang diangkat Dalam Putusan Pailit -----	46
D. Aset Tidak Likuid Dalam Kepailitan -----	47
1. Pengertian Aset Tidak Likuid -----	48
2. Karakteristik Aset Tidak Likuid -----	49
3. Jenis-jenis Aset Tidak Likuid -----	51
E. Likuidasi Harta Pailit dan Mekanisme Pembagian Hasil Pembersihan -----	52
1. Pengertian Pembersihan Harta Pailit -----	52
2. Pengertian, Tata Cara dan Tujuan Penjualan Aset Dimuka Umum -----	53
3. Pengertian, Tata Cara dan Tujuan Penjualan Aset Dibawah Tangan -----	55
F. Pembagian Hasil Pembersihan -----	57
1. Prinsip Paritas Kreditor -----	57
2. Mekanisme Pembagian Hasil Pembersihan -----	60

BAB III PERAN KURATOR DALAM MENYELESAIKAN KEPAILITAN PERUSAHAAN DENGAN ASET TIDAK LIKUID BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DI INDONESIA

A. Proses Kepailitan Menurut UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 -----	63
1. Mekanisme Pengajuan, Putusan dan Pelaksanaan ----	63
2. Peran Sentral Kurator Sebagai Pelaksana Eksekusi Aset -----	68

B. Aset Tidak Likuid dan Implikasinya dalam Hukum Kepailitan di Indonesia -----	77
C. Analisis Praktik Kurator dan Tantangan yang dihadapi Kurator dalam Penjualan Aset Tidak Likuid di Pelelangan Umum -----	82
D. Analisis Praktik Kurator dan Tantangan yang dihadapi Kurator dalam Penjualan Aset Tidak Likuid Dibawah Tangan -----	90
E. Studi Kasus: Kepailitan Batavia Air dan Kendala Kurator dalam Penjualan Aset Dimuka Umum dan Dibawah Tangan -----	94
F. Analisis Kendala Penjualan Aset Tidak Likuid Terhadap Tanggungjawab Kurator kepada Kreditor dan Prinsip Kepailitan -----	99
G. Penerapan Hukum Progresif Dalam Proses Pemberesan Harta Pailit agar Memberikan Manfaat Maksimal bagi Kreditor -----	102
1. Aspek Keadilan Substantif -----	102
2. Aspek Inovasi Dalam Pemberesan Harta Pailit -----	106

BAB IV

STRATEGI YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KURATOR DALAM MENGOPTIMALKAN PEMBERESAN ASET TIDAK LIKUID GUNA MEMENUHI HAK-HAK KREDITOR SECARA ADIL DAN PROPORSIONAL

A. Evaluasi Efektifitas Regulasi Kepailitan Dalam Mendorong Efesiensi Pemberesan Aset -----	111
B. Analisis Strategi Ekonomi Hukum Kurator: Negosiasi, Restrukturisasi, <i>Aset Pooling</i> , atau Kerjasama Investasi -----	117
C. Prinsip Efesiensi dan <i>Wealth Maximization</i> Dalam Menentukan Pilihan Tindakan Kurator -----	124
D. Model Alternatif Penyelesaian: <i>Private Sale</i> , <i>Debt to Equity Swap</i> atau <i>Auction Consortium</i> -----	129
E. Analisis <i>Cost Benefit</i> Terhadap Strategi Hukum yang Diterapkan Kurator -----	134

	F. Implikasi Strategi Tersebut Terhadap Pembentukan Hak Kreditor Secara Proporsional dan Adil -----	139
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan -----	144
	B. Saran -----	145
	DAFTAR PUSTAKA -----	



ABSTRAK

Kepailitan merupakan salah satu instrumen hukum yang disediakan oleh negara untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor. Keadaan pailit adalah peristiwa yang dapat dialami oleh siapa saja, baik individu maupun badan hukum. Dalam hal debitor merupakan sebuah badan usaha, kendala yang sering ditemui adalah harta pailit yang kebanyakan merupakan aset tidak likuid yaitu berupa piutang tak tertagih dan benda tidak bergerak seperti tanah yang dalam kasus sengketa, properti, mesin-mesin tua, alat-alat berat dengan teknologi usang, dan sebagainya. Aset-aset semacam ini tidak hanya sulit diuangkan, tetapi juga rentan terhadap depresiasi dan fluktuasi nilai pasar, yang pada akhirnya berdampak pada minimnya hasil pemberesan untuk para kreditor. Akibatnya, tujuan utama dari kepailitan yaitu penyelesaian utang secara adil dan proporsional bagi seluruh kreditor, tidak tercapai secara efektif.

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Ekonomi (*Economic Analysis of Law*). Teori hukum progresif mendorong kurator untuk bertindak kreatif dan responsif demi mencapai keadilan substantif, tanpa terpaku pada mekanisme formal lelang yang kerap tidak efektif. Sementara itu, teori *Economic Analysis of Law* membantu menilai strategi kurator yang paling efisien secara biaya, bermanfaat bagi para pihak, dan mampu mempertahankan nilai boedel pailit, tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, dan bahan Hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurator membutuhkan ruang gerak strategis, termasuk penggunaan penjualan di bawah tangan, penilaian berkala, dan langkah proaktif untuk mencegah depresiasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi teknis untuk memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, efisiensi ekonomi, dan keadilan substantif bagi para pihak. Strategi seperti negosiasi, restrukturisasi aset, *asset pooling*, kerja sama investasi, *private sale*, *debt-to-equity swap*, dan *auction consortium* terbukti dapat meningkatkan nilai boedel pailit dan menekan biaya transaksi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *wealth maximization* dalam analisis ekonomi hukum, yang menyatakan bahwa tindakan yang menghasilkan manfaat ekonomi terbesar merupakan tindakan hukum yang paling efisien. Ketika nilai boedel meningkat, ruang untuk pembagian kepada kreditor turut membesar, sehingga prinsip keadilan distributif dapat dicapai secara lebih proporsional, terutama bagi kreditor konkuren yang paling rentan mengalami kerugian dalam proses kepailitan. Dengan demikian, strategi pemberesan aset tidak likuid bukan hanya berfungsi ekonomis, tetapi juga mendukung tujuan keadilan sebagaimana ditekankan dalam hukum progresif.

Kata Kunci: Kurator, Kepailitan, Aset Tidak Likuid, *Economic Analysis of Law*, Hukum Progresif.

ABSTRACT

Bankruptcy is a legal instrument provided by the state to provide legal certainty in the settlement of debts between debtors and creditors. Bankruptcy is an event that can be experienced by anyone, both individuals and legal entities. In cases where the debtor is a business entity, a common obstacle is that bankruptcy assets are largely illiquid, consisting of uncollectible receivables and immovable property such as disputed land, real estate, old machinery, heavy equipment with outdated technology, and so on. These types of assets are not only difficult to liquidate, but also prone to depreciation and market value fluctuations, which ultimately result in minimal settlement proceeds for creditors. As a result, the main objective of bankruptcy, namely a fair and proportional settlement of debts for all creditors, is not effectively achieved

Economic Analysis of Law. Progressive law theory encourages trustees to act creatively and responsively in order to achieve substantive justice, without being bound by formal auction mechanisms that are often ineffective. Meanwhile, the Economic Analysis of Law theory helps assess the most cost-efficient strategies for trustee, which are beneficial to the parties and capable of maintaining the value of the bankruptcy estate, without neglecting the applicable legal provisions. The research method used is normative legal research, with an approach based on Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of the research show that trustees need strategic maneuvering room, including the use of under-the-table sales, periodic assessments, and proactive measures to prevent depreciation. This study emphasizes the importance of technical reforms to ensure a balance between legal certainty, economic efficiency, and substantive justice for all parties. Strategies such as negotiation, asset restructuring, asset consolidation, investment cooperation, private sales, debt-to-equity swaps, and auction consortiums have been proven to increase the value of bankruptcy assets and reduce transaction costs. This approach is in line with the principle of wealth maximization in legal economic analysis, which states that actions that generate the greatest economic benefits are the most efficient legal actions. When the value of bankruptcy assets increases, the scope of distribution to creditors also increases, so that the principle of distributive justice can be achieved more proportionally, especially for concurrent creditors who are most vulnerable to losses in the bankruptcy process. Therefore, illiquid asset liquidation strategies not only function economically, but also support the goals of justice as emphasized in progressive law.

Keywords: Trustee, Bankruptcy, Illiquid Assets, Economic Analysis of Law, Progressive Law.